

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, Partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pengelolaan dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban bantuan partai politik yang berasal dari APBD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada perbedaan jumlah penerimaan untuk setiap tahun anggaran, sesuai dengan jumlah perolehan suara pada pemilihan umum periode 2019-2024 serta pelaporan dilakukan selalu tepat waktu.

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi belum terbuka untuk eksternal partai, hanya kalangan internal saja yang dapat mengetahuinya. Namun DPP PDI Perjuangan telah transparan dengan adanya bukti laporan yang dimaksud, dan dapat diakses melalui laman partai politik PDI Perjuangan pada link <https://pdiperjuangan.id/>. Bantuan keuangan partai poliitk yang bersumber dari APBD memberikan dampak yang positif bagi partai PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi, hal ini dikarenakan bantuan keuangan sangat membantu partai politik dalam menjalankan peran, tugas, dan aktivitas partai politik sebagaimana semestinya.

5.2 Implikasi Manajerial

5.2.1. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki banyak keterbatasan dalam hal penelitian yaitu:

1. Peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Hal ini dikarenakan topic yang diangkat dalam penelitian ini tergolong sensitive.
2. Selama penelitian, peneliti kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan para pengurus inti partai PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi untuk melakukan wawancara. Hal ini dikarenakan jadwal

kegiatan partai politik yang cukup padat serta para pengurus yang direncanakan untuk menjadi narasumber juga memiliki jadwal pribadi yang padat di tempat mereka bekerja masing-masing. Namun peneliti mendapat kesempatan mewawancarai narasumber lain yakni Wakil Ketua Ranting PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi.

5.2.2. Saran untuk Instansi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk partai politik PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi. Peneliti berharap agar partai PDI Perjuangan DPC Kota Bekasi lebih terbuka dengan pihak eksternal terutama dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai, agar masyarakat Kota Bekasi dapat lebih antusias dalam melihat kinerja partai. Dan agar sesuai dengan hal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban haruslah terbuka untuk diketahui masyarakat.

5.2.3. Saran untuk peneliti berikutnya

Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat membandingkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang ada di Kota Bekasi.